



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A

Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Telp./Fax (0481) 21018

WATAMPONE

Website : pa-watampone.go.id e-mail: pawatampone1a@gmail.com

PENGUMUMAN

PENGADAAN LANGSUNG PENYEDIA JASA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE I A TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : W20-A20/2602/HM.01/XII/2022

Dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran DIPA Pengadilan Agama Watampone Kelas I A TA 2023 Nomor SP DIPA-005.04.2.309076/2023 tanggal 30 Nopember 2022, maka Pengadilan Agama Watampone Kelas I A membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Konsultasi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) TA 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Kepala Biro Umum Mahkamah Agung selaku Kepala ULP Nomor 3/Bua.ULP/2/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PAKET PEKERJAAN

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Penyedia Jasa Konsultasi Layanan Posbakum
Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
Alamat : Jalan Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone
Nilai HPS : Rp70.000.000,- (*Tujuh puluh juta rupiah*)
Sumber Dana : DIPA Nomor 005.04.2.309076/2023
Tanggal 30 Nopember 2022
Metode yang digunakan : **Metode Pengadaan Langsung**

B. PERSYARATAN

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari organisasi Profesi Advokat / LBH Perguruan Tinggi / Organisasi LBH dari Lembaga Swadaya Masyarakat;
2. Memiliki struktur kepengurusan yang jelas;
3. Memiliki kantor dan alamat yang jelas di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dan atau sekitarnya
4. Telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum yang di tetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Advokat dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Perhimpunan / Ikatan Profesi yang ditugaskan sebagai Team Leader;
6. Memiliki minimal 1 (satu) orang staf atau anggota yang nantinya bertugas di POSBAKUM Pengadilan, yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah atau mahasiswa yang telah menempuh 140 SKS yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS);
7. Memiliki NPWP Lembaga / organisasi;

8. Memiliki rekening atas nama Lembaga/Organisasi/Pengurus LBH dibuktikan dengan lampiran surat keterangan dari Bank atau foto copy rekening koran;
9. Berpengalaman sebagai penyedia Jasa Layanan Posbakum di Pengadilan Agama minimal 2 (dua) tahun
10. Bersedia menyediakan alat pengolah data dan ATK untuk melaksanakan jasa Posbakum ini dibuktikan dengan surat pernyataan;
11. Surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas.
12. Memiliki akun level penyedia pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung RI

C. TAHAPAN PENDAFTARAN

1. Proses seleksi dokumen kualifikasi administrasi dan wawancara uji kompetensi terhadap beberapa penyedia yang memasukkan permohonan untuk mendapatkan dokumen kualifikasi administrasi yang berkualitas dan SDM yang berkompeten.
2. Setiap Peserta wajib membuat surat permohonan dan memasukkan dokumen kualifikasi administrasi sebagai calon penyedia jasa Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun Anggaran 2023. Surat permohonan ditujukan kepada **“Pejabat Pengadaan Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A”** dengan mencantumkan nomor telepon dan alamat email
3. Pendaftaran berupa surat permohonan dan pemasukan dokumen kualifikasi administrasi mulai tanggal **29 s.d 30 Desember 2022** dari jam **08.00 sd 16.30 WITA** (hari kerja dan jam kerja)
4. Dokumen dikirim kealamat kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, Jalan Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone (Pengiriman dokumen melalui Pos/Jasa antar dokumen yang diterima melebihi batas waktu sesuai ketentuan poin 1, tidak akan diikutsertakan dalam verifikasi)
5. Dokumen kualifikasi administrasi terdiri dari :
 - Memiliki izin usaha
 - Memiliki bidang pekerjaan
 - Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan)
 - Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
 - Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c. Kartu Tanda Penduduk
 - Pakta Integritas:
 - Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi :
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

- c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara

D. TAHAPAN JADWAL DAN SELEKSI

No	Tanggal	Kegiatan
1	29 sd 30 Desember 2022	Pemasukan dokumen kualifikasi administrasi
2	02 Januari 2023	Pengumuman hasil verifikasi dokumen kualifikasi administrasi
3	03 s.d 04 Januari 2023	Wawancara dan uji kompetensi petugas posbakum dan team leader
4	04 Januari 2023	Pengumuman pemenang 1-3 (nilai hasil verifikasi dokumen kualifikasi administrasi + nilai wawancara dan uji kompetensi)
5	5 s.d 13 Januari 2023	Pemenang 1 hasil verifikasi akan diundang untuk memasukkan proses penawaran melalui LPSE MA untuk mengikuti e-Pengadaan Langsung
		Selanjutnya dalam proses e-Pengadaan Langsung melalui LPSE MA akan melalui tahapan sbb : <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan penawaran - Klarifikasi dan negosiasi harga - BAHPL (Berita Acara Hasil PengadaanLangsung) - Penunjukan sebagai penyedia Posbakum - Penandatanganan Perjanjian / MoU / Kontrak Kerja dan SPMK
		Apabila pemenang 1 tidak terjadi kesepakatan harga melalui proses klarifikasi dan negosiasi harga, maka dinyatakan gugur dalam proses pengadaan langsung melalui LPSE MA, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan undangan pengadaan langsung kepada pemenang 2, dst, sampai proses e-Pengadaan Langsung selesai pada tahapan Penandatanganan Perjanjian / MoU / Kontrak Kerja dan SPMK

Pengumuman hasil Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Konsultansi Layanan Posbakum dapat dilihat pada Website Pengadilan Agama Watampone Kelas I A atau pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui.

Watampone, 28 Desember 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Penyedia Jasa Posbakum
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A



Dadang Soenandar Hamzah, SE
Nip. 1988/2212015031001